

Citarum yang Merana dalam Pengabaian Nilai Kabuyutan Orang Sunda

Ujang Suyatman. Dosen Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
suyatman806@gmail.com

Abstract

It is not enough to rely only on science and technology to solve the environmental crisis that is hitting the world globally today. It needs a strength in the form of moral and cultural values that the community believed so they can grow their awareness of the environment. This is the same as the Sundanese people in West Java with the crisis of Citarum river as one of the rivers that has important and strategic roles in Indonesia. The complexity of the problems that have damaged the Citarum ecosystem cannot be solved only by relying on a variety of regulations issued by the government without community intervention. The excavation and utilization of *kabuyutan* and *tritangtu* philosophy as the Sundanese heritage of logical, ethical, and aesthetic values are expected to be one of the supports for the re-growth of public concern for the environment. Therefore, they are expected to participate in the preservation of Citarum, so that the strategic function of this river can be maintained sustainably.

Keywords: *Citarum, environmental crisis, kabuyutan, tritangtu, Sundanese cultural heritage*

Abstrak

Krisis lingkungan yang melanda dunia secara global dewasa ini tidak cukup hanya mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikannya, melainkan dibutuhkan satu kekuatan berupa landasan nilai-nilai moral dan nilai-nilai budaya yang diyakini masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kesadaran tentang lingkungan hidupnya. Demikian juga halnya dengan masyarakat Sunda di Jawa Barat terkait dengan krisis yang melanda Sungai Citarum sebagai salah satu sungai yang memiliki peran penting dan strategis di Indonesia. Kompleksitas permasalahan yang telah merusak ekosistem Citarum tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengandalkan beragam aturan yang dikeluarkan pemerintah semata, tanpa adanya peran serta masyarakat di dalamnya. Penggalan dan pemanfaatan *kabuyutan* dan filsafat *tritangtu* sebagai warisan nilai-nilai logika, etika, dan estetika leluhur Sunda diharapkan menjadi salah satu penopang tumbuhnya kembali kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat berperan serta dalam menjaga kelestarian Citarum, sehingga fungsi strategis yang dimiliki sungai ini dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Citarum, krisis lingkungan, kabuyutan, tritangtu, warisan budaya Sunda



PENDAHULUAN

Masalah-masalah lingkungan hidup senantiasa menjadi isu global yang banyak diperbincangkan akhir-akhir ini. Hal tersebut penting, mengingat krisis ekologi yang antara lain disebabkan oleh dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang disertai rendahnya kesadaran masyarakat dunia tentang lingkungan hidupnya, telah menimbulkan beragam kerusakan di planet bumi ini. Bonnett (2007, dalam (Napitupulu et al., 2018), mengatakan bahwa beragam masalah seperti pemanasan global, penipisan ozon, polusi udara dan air, degradasi lingkungan, menyempitnya lahan hijau, serta punahnya sejumlah spesies hewan dan tumbuhan menjadi fenomena yang nampak di depan mata kita. Jika tidak ditangani, kerusakan-kerusakan lingkungan itu tidak saja akan menyulitkan, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup umat manusia sendiri (Nasr, 1990).

Senada dengan Nasr, Thomas Berry, seorang ahli ekologi, menyebutkan bahwa krisis saat ini sebagai “kehancuran bumi”. Pernyataan Berry merupakan simpulan dari hasil pengamatannya yang menggambarkan bahwa sedikitnya sepuluh ribu spesies di bumi musnah dalam setiap tahunnya. Ia meramalkan, bahwa kemusnahan beragam spesies akan membawa kepada kemusnahan dunia kita sendiri, termasuk manusia di dalamnya (Aritonang, 2018).

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa kerusakan ekologi telah terjadi di berbagai sudut bumi, termasuk sungai-sungai yang memiliki peran strategis untuk kehidupan manusia. Beberapa sungai yang memiliki nilai

penting secara ekologi dan ekonomi bagi penduduk dunia dinyatakan telah tercemar dan menjadi penyumbang limbah, terutama sampah plastik yang membahayakan kelangsungan hidup keanekaragaman hayati sungai dan lautan yang menjadi muaranya. Sungai-sungai tersebut antara lain: Sungai Yangtze, Sungai Kuning dan Sungai Hai di Cina, Sungai Indus dan Sungai Gangga di India, Sungai Nil di Mesir, Sungai Mutiara (*Pearl River*) di Hongkong, serta Sungai Niger di Afrika Barat (DW Indonesia/RZN/HP, 2018).

Sementara itu, sungai-sungai di Indonesia pun berada dalam kondisi yang tidak jauh berbeda. Dalam sebuah diskusi dalam memperingati Hari Air Sedunia tahun 2018, Direktur *Forest and Freshwater* dari *World Wide Fund for Nature* (WWF) Indonesia, Irwan Gunawan, melaporkan bahwa dari sekitar 550 sungai yang tersebar di Indonesia, 82 persennya dalam kondisi tercemar dan kritis. Salah satu di antara sungai-sungai itu yang memiliki nilai strategis bagi penduduk Indonesia adalah Sungai Citarum di Jawa Barat (Republika.co.id, 2019). Bahkan, Citarum dinyatakan sebagai salah satu di antara 5 sungai yang paling tercemar di dunia versi *Help Save Nature* (Merdeka.com/Did, 2018).

Beragam aktivitas manusia saat ini menjadi faktor utama penyebab kerusakan lingkungan. Hal ini terjadi seiring meningkatnya jumlah penduduk, sehingga tindakan eksploitasi secara intensif terhadap sumber daya alam pun dilakukan. Kondisi itu diperparah dengan adanya kecenderungan karakteristik manusia modern yang materialistik dan hedonistik dengan cara pandang yang keliru terhadap

sistem lingkungan hidupnya (Maridi 2015). Solusi untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup saat ini tidak bisa sekadar mengandalkan kemampuan sains dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah saja, tetapi dibutuhkan semacam kekuatan berupa nilai-nilai moral maupun religius yang dapat mengubah pemahaman dan perilaku manusia terhadap lingkungannya secara radikal dan fundamental sehingga menjadi sebuah budaya bagi masyarakat secara luas (Naess, 1993 dalam Kementerian Lingkungan Hidup, 2011, hal. 3).

Melihat kenyataan itu, akhir-akhir ini banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli untuk menggali dan menemukan kembali nilai-nilai agama atau budaya yang dapat dijadikan pedoman bagi manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Upaya-upaya itu diharapkan dapat meluruskan pemahaman atau cara pandang serta perilaku masyarakat yang keliru terhadap lingkungan hidupnya. Di antara penelitian-penelitian yang telah dibuat itu, penulis menemukan sejumlah kajian mengenai nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Sunda yang diangkat kembali oleh para pakar budayawan ilmu-ilmu sosial lainnya, terutama terkait dengan penanganan masalah kerusakan Citarum sebagai salah satu sungai yang memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat di Jawa Barat.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, tulisan ini mencoba untuk melukis-jelaskan kembali nilai-nilai budaya/kearifan lokal masyarakat Sunda yang dicoba diangkat guna mengatasi krisis lingkungan, terutama kerusakan yang terjadi pada Citarum. Dalam tulisan ini juga dikemukakan

tentang peran dan fungsi Citarum dalam lintasan sejarahnya, dinamika kehidupan budaya masyarakat Sunda, serta dampaknya bagi kelestarian ekosistem Citarum akibat pengabaian nilai-nilai budaya masyarakat Sunda dewasa ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran dan analisis terhadap beragam informasi, baik yang ditulis dalam media cetak maupun elektronik. Sejumlah hasil penelitian dengan beragam isu yang dibahas telah ditemukan. Namun, mengingat keterbatasan yang ada pada penulis dalam mencerna sedemikian banyaknya informasi yang ada, upaya-upaya untuk melakukan pemilahan terhadap sumber-sumber bacaan itu pun menjadi sebuah keniscayaan. Pemilihan bahan-bahan kepustakaan lebih diorientasikan pada informasi-informasi atau hasil-hasil penelitian yang relevan dengan temapengkajian dalam tulisan ini, yaitu tentang penemuan kembali nilai-nilai budaya/kearifan lokal masyarakat Sunda sebagai ikhtiar dalam menangani krisis Citarum yang menjadi salah satu isu lingkungan hidup di Indonesia yang banyak diperbincangkan dalam dekade ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Air dalam Pandangan Kosmologi Sunda

Air merupakan sarana penting bagi kehidupan manusia. Tidak ada air, tidak akan ada kehidupan manusia, sehingga kebudayaan pun tidak akan tercipta (Budiman, 2015). Dalam budaya Sunda, air diyakini sebagai salah satu unsur *tritangtu*, yaitu tiga unsur utama penyebab terciptanya dunia.



Tritangtu menjadi falsafah hidup bagi orang Sunda dalam menjaga keharmonisan dengan alam lingkungannya (Rusmana, 2018). Dalam hal ini, keberadaan air sebagai salah satu unsurnya melengkapi unsur batu dan tanah. Ketiganya tidak bisa dipisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam mewujudkan sebuah kehidupan yang berkebudayaan.

Filsafat *tritangtu* merupakan warisan budaya/kepercayaan *Sunda Wiwitan*. Namun nilai kasundaan ini tetap dipertahankan meskipun masyarakat Sunda sudah berganti kepercayaan pada agama-agama baru yang datang kemudian, yaitu agama Hindu dan Islam (Sumardjo, 2009).

Pandangan kosmologi *Sunda Wiwitan* berdasar pada mitos yang menyebutkan bahwa dunia ini berawal dari kehampaan (*awang-awang, uwung-uwungan*). Kemudian muncul tiga batara, yakni Batara Keres (kehendak), Batara Kawasa (kekuasaan atau tenaga), dan Batara Bima Mahakarana (penyebab, pikiran). Ketiganya menyatu dan menjadi kesatuan dalam wujud Batara Tunggal atau Sang Hyang Tunggal, dan terciptalah dunia ini. Mitos atau kepercayaan Sunda kuno ini terimplementasi dalam wujud nilai-nilai yang harus dipatuhi. Dalam kehidupannya, manusia sebagai gambaran Sang Hyang Tunggal harus bisa menjaga *tekad, ucap, jeung lampah* (kehendak, pikiran atau perkataan, dan perbuatan).

Sementara itu, dalam sistem kekuasaan Sunda lama, filsafat tiga pola ini terlihat dalam unsur-unsur kekuasaan yang terdiri dari *resi, ratu, dan rama*. Ketiga unsur kekuasaan itu memperlihatkan hubungan yang tidak terpisahkan antara *tekad, ucap dan*

lampah. *Resi* adalah pendeta yang memiliki kehendak. Dalam kebudayaan Sunda, *resi* disimbolkan dengan air. Ratu adalah pemerintah yang memiliki pikiran (*mind*) atau strategi untuk memerintah. Ia disimbolkan dengan batu. Sedangkan *rama* adalah rakyat dengan simbol tanah (Sumardjo, 2009, hal. 103). Air menjadi simbol pemimpin (*resi*) karena berasal dari atas (langit) yang turun ketika hujan untuk memberikan kesejukan dan kesuburan bagi bumi, tempatnya *ratu* (batu) dan *rama* atau rakyat (tanah) (Johari, 2016).

Ketika masyarakat Sunda menganut kepercayaan Hindu-Budha, konsep *tritangtu* mengalami pergeseran. Namun, pandangan kosmologi Sunda tetap terbagi ke dalam tiga alam utama, yaitu *niskala, sakaladan jatiniskala*. Konsep *awang-awang uwung-uwungan* memang tidak lagi dikenal, tetapi nilai kehampaan atau kekosongannya yang mencerminkan alam rohani manusia masih diketemukan. Hal itu antara lain tersirat dalam pantun *Panggung Karaton*. Konsep kehampaan dari pantun tersebut melahirkan ungkapan *ayana aya ayana euweuh, aya tëh euweuh, euweuh tëh aya*. Ungkapan tersebut menjadi bagian dari sebuah ajaran yang kemudian dikenal sebagai Ilmu Kosong Nenek Moyang Galuh (Sumardjo, 2009, hal. 107).

Konsep kasundaan *awang-awang uwung-uwungan* juga bertahan pada saat orang Sunda memeluk agama Islam. Jika pada *Sunda Wiwitan* dunia atas itu dihuni oleh *Sang Hyang Tunggal*, dan pada masa Hindu dihuni oleh *Jatiniskala*, maka pada zaman Islam konsepnya sudah dibingkai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam pantun *Sulanjana*, dunia atas itu ditempati *Nur Muhammad*, sedangkan Allah SWT

berada di atas alam itu. Dari Nur Muhammad itulah kemudian Allah menciptakan malaikat, jin, setan, siluman, serta langit dan bumi (Sumardjo, 2009, hal. 108).

Bertahannya nilai kasundaan tentang *awang-awang uwung-uwungan* ini menyiratkan bahwa kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari alam lingkungannya. Ketakterpisahan itu antara lain disebabkan secara geografis dan geologis Tatar Sunda dilingkupi dengan banyaknya pegunungan, lembah, sungai, dan lautan (Djaseudin, 2019). Ketakterpisahan itu pun menjadi sebuah identitas komunitas bagi orang Sunda terkait dengan tempat asal mereka. Banyak daerah yang namanya diawali dengan *ci* (*cai*, yaitu air), seperti Cimahi, Cicalengka, Cipadung, Cibiru, Cimenyan, Cinunuk dan Cicaheum. Juga nama-nama daerah yang menunjukkan tempat keberadaan air, seperti Rancabuaya, Rancasaladah, Rancaekek, Rancaupas, Leuwigajah, Leuwigoong, Leuwiliang, Curug Cinulang, Karanganyar, Karangkamulyan, ParakanMuncang, Sumur Bandung, Bantar Gebang, Bantarujeg dan Sasak Saat.

Pemakaian atribut air dalam identitas komunitas tidaklah sebatas melihat air sebagai salah satu wujud benda alam, tetapi menunjukkan suatu pandangan hidup komunitas Sunda yang bersifat ekologis. Bagi masyarakat Sunda, air merupakan nilai *kabuyutan* yang dikeramatkan. Pemberian nilai sakral atau mulia pada *kabuyutan* ini bukanlah karena ia dipandang memiliki daya magis, akan tetapi lebih dititik beratkan pada nilai vitalitasnya bagi kelangsungan hidup manusia (Gemini, 2017).

Kabuyutan merupakan istilah yang terbentuk dari kata dasar *buyut*. Kata ini

bisa diartikan keturunan keempat ataupun leluhur keempat. Juga dimaknai sebagai pantangan/tabu atau *pamali*, yaitu aturan-aturan tentang hal-hal yang terlarang untuk dilakukan. *Kabuyutan* dengan makna *pamali* merupakan makna yang relevan dengan pembahasan ini. Di samping itu, karena aturan-aturan itu biasanya terkait dengan suatu benda atau tempat, maka *kabuyutan* pun kadang dimaknai sebagai kata benda yang merujuk pada tempat-tempat atau benda-benda tertentu yang dimuliakan atau dikeramatkan, seperti pepohonan, hutan, sungai dan lainnya (Kusmayadi, 2015). Dalam konteks lingkungan hidup, *kabuyutan* mengandung makna sumber daya alam dalam wujud lahan yang meliputi hutan, gunung, sungai dan sebagainya, termasuk keanekaragaman hayati maupun non-hayati di dalamnya. Alam dengan beragam kekayaan sumberdayanya ini diwariskan oleh leluhur Sunda dari generasi ke generasi (Abdurahman & Yustiaji, 2003).

Menurut Abdurahman & Yustiaji (2003), *kabuyutan* menjadi salah satu dimensi budaya Sunda yang sangat penting. Ia mewariskan beragam nilai leluhur yang mencakup nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, sejarah, dan alam lingkungan. Nilai-nilai tersebut dapat ditransformasikan dari generasi ke generasi dalam upaya mengembangkan sumber daya ekonomi maupun upaya pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Nenek moyang Sunda sudah melakukan upaya perlindungan dan pemeliharaan *kabuyutan* agar lestari. Mereka pun menitipkan amanat agar anak-cucunya melanjutkan upaya-upaya tersebut sehingga menjadi masyarakat/bangsa yang mulia dan



merdeka, terutama dari belenggu nafsu keserakahan. Jika hal itu tidak dilakukan, kehinaanlah yang akan menimpa nasib suatu bangsa. Dalam hal ini, Prabu Darmasiksa, salah satu leluhur Sunda, dalam amanatnya mengemukakan: *mulyana kulit lasun di jaryan, madan na rajaputra, antukna boning ku sakalaih* (Atja & Danasasmita, 1981), kulit musang yang tercampak di tempat sampah itu lebih berharga daripada putra mahkota yang tidak bisa mempertahankan tanah airnya atau tanah leluhurnya (penerjemahan diadaptasi Suryalaga, 2009; Abdurahman & Yustiaji, 2003).

2. Sejarah, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Citarum

a. Kilas Sejarah dan Nilai Penting Citarum

Keharmonisan dan ketakterpisahan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya, sebagaimana yang diungkap dalam nilai-nilai di atas, begitu nampak dalam peran dan fungsi Sungai Citarum bagi kehidupan masyarakat Jawa Barat. Sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Barat ini membentang sejauh kurang lebih 270 kilometer dari kaki Gunung Wayang di Bandung selatan hingga bermuara di Laut Jawa di daerah Ujung Karawang. Ia melewati beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat, dan sejak zaman sejarahnya, telah memberi hidup dan sumber kehidupan bagi jutaan manusia di daerah-daerah yang dilaluinya. Bahkan, Citarum pun telah menerangi puluhan juta rakyat Indonesia di Pulau Jawa dan Bali dengan energi listrik yang dibangkitkannya (Wawa, 2011).

Citarum merupakan salah satu *kabuyutan* masyarakat Sunda. Penamaan sungai ini dengan sebutan

Citarum, tidak didapati data sejarah yang jelas. Namun, penamaan itu diduga sudah berlangsung sejak zaman Mesolitikum, yaitu masa prasejarah ketika manusia sudah mulai memiliki budaya hidup menetap di suatu tempat. Di tempat itu banyak ditumbuhi pohon *tarum* (bahasa Sunda yang berarti ungu), yang karenanya banyak dimanfaatkan oleh masyarakat tradisional sebagai pewarna dasar kain. Tarum termasuk ke dalam jenis tumbuhan polong (kacang-kacangan). Tumbuhan ini bisa memberi kesuburan bagi tanah yang ditempatinya, dan akarnya cukup efektif untuk mencegah erosi

(<https://id.wikipedia.org/wiki/Tarum>). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Heyne (1927), tumbuhan ini juga menjadi tanaman obat dan penyubur rambut, sehingga banyak dimanfaatkan orang Sunda zaman dulu untuk penyubur rambut anak-anak mereka dan obat sakit perut (<http://citarum.bappenas.go.id/>).

Penamaan sungai ini dengan Citarum juga dikaitkan dengan ditemukannya sebuah kerajaan tertua di Jawa barat, Tarumanagara, yang didirikan Maharesi Jayasinghwarman. Pada tahun 348 M, Jayasinghwarman yang berasal dari Kerajaan Salankayana, India, melarikan diri dari negeri asalnya dan sampai di tanah Jawa (Jawa Barat) setelah kerajaannya ditaklukkan raja Maurya dari Samudragupta di tahun 345 M. Di tempat barunya, ia kemudian membangun perkampungan yang diberi nama Jayasinghapuradi tepian Citarum. Perkampungan itu pada akhirnya dijadikan sebagai pusat dan ibukota Kerajaan Tarumanagara yang didirikannya (Hardjasaputra, 2009).

Sepanjang sejarahnya, Citarum memiliki kedudukan dan arti yang

sangat penting bagi masyarakat di sepanjang daerah yang dilaluinya. Secara panjang lebar, Hardjasaputra (2009) yang menuturkan bahwa Citarum telah menjadi sumber kehidupan bagi manusia prasejarah, terutama untuk pertanian dan kegiatan menangkap ikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya beragam peninggalan budaya yang ditemukan dalam situs-situs prasejarah di daerah-daerah sepanjang tepian Citarum. Pemanfaatan Citarum sebagai sarana penting bagi kehidupan kemudian berkembang seiring dinamika masyarakat Sunda pada masa sejarah hingga masa-masa setelahnya.

Pada saat Tarumanagara berkuasa, Citarum difungsikan sebagai jalur transportasi masyarakat dan jalur perdagangan hasil-hasil pertanian. Di samping itu, ketika Tarumanagara diperintah oleh Purnawarman, Citarum menjadi pemasok kebutuhan air bagi pusat kerajaan dengan dibangunnya parit-parit yang menghubungkan pusat kerajaan dengan sungai. Saluran air yang dibangun Purnawarman itu kemudian dikenal dengan kali Gomati dan Candrabhaga yang menjadi anak-anak Sungai Citarum.

Ketika Tarumanagara mengalami kemunduran dan berganti nama menjadi Kerajaan Sunda pada tahun 670 M., Citarum menjadi tapal batas yang memisahkan wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda dengan Kerajaan Galuh yang telah memisahkan diri. Wilayah barat Citarum dikuasai Kerajaan Sunda, sedangkan wilayah timurnya dikuasai Kerajaan Galuh hingga akhir abad ke-15 M. Pemanfaatan Citarum sebagai pemisah wilayah kerajaan juga terjadi pada masa Kesultanan Cirebon dan Banten menguasai tatar Sunda pada sekitar abad 15 hingga 19 M. Banten menguasai wilayah barat, sedangkan

Cirebon berkuasa di wilayah timur sungai Citarum.

Pada paruh pertama abad ke-17 Kabupaten Bandung didirikan. Daerah Karapyak di wilayah Citeureup, yang terletak di daerah tepian sungai Citarum, dipilih sebagai ibukota kabupaten. Pemilihan itu didasarkan pada kepentingan masyarakat yang sebagian besar tinggal di wilayah Bandung Selatan. Citarum digunakan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, peternakan, pertanian dan jalur transportasi orang atau barang, sehingga di beberapa tempat seperti Margahayu dan Dayeuhkolot dibangun dermaga-dermaga pemberhentian serta alat transportasi untuk penyeberangan berupa perahu atau rakit-rakit. Di abad yang sama, pemerintahan Belanda melalui perserikatan dagangnya (VOC) membangun pelabuhan dan benteng pertahanan di daerah Tanjungpura, muara Citarum di Karawang. Pendirian bangunan-bangunan tersebut digunakan sebagai sarana penunjang kegiatan ekonomi dan pertahanan (Hardjasaputra, 2009).

b. Pemeliharaan dan Pelestarian Citarum Tempo Dulu

Falsafah *tritangtu* merupakan nilai budaya Sunda yang awalnya dikenal sebagai masyarakat peladang (*huma*). Nilai-nilai inilah yang menjadi pedoman dalam menata kehidupan mereka, demikian pula dengan kehidupan masyarakat di kawasan hulu Citarum di Bandung Selatan, tempo dulu. Pada masa itu, mereka bermukim di wilayah-wilayah pegunungan, dan hidup dengan cara berladang. Keyakinan kepada nilai-nilai falsafah *tritangtu* menjadikan kehidupan mereka terbentuk dalam tatanan yang memiliki tiga pola, yaitu langit yang menurunkan air hujan, bumi



yang menumbuhkan pepohonan, dan manusia mengawinkan keduanya dalam menciptakan kehidupan. Ketika budaya berladang bergeser menjadi budaya sawah, masyarakat tetap memelihara dan memedomani nilai-nilai *tritangtu* yang mereka warisi (Rusmana, 2018, 115). Dengan kenyataan ini, dapat dipastikan bahwa hubungan harmonis antara masyarakat Sunda dengan sungai Citarum tetap terjaga. Sehingga *kabuyutan* Sunda ini terpelihara dengan kondisi baik dan terus memberikan manfaat kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya.

Pendapat ini setidaknya dikuatkan oleh Hardjasaputra (2009), yang mengatakan bahwa ekosistem Citarum terpelihara dengan baik, setidaknya hingga abad ke-19. Dalam perkembangan sejarahnya, pemeliharaan Citarum oleh masyarakat pribumi tidak bisa dilepaskan dari adanya pengaruh dan kewibawaan bupati terhadap rakyatnya. Kedudukan bupati bagi masyarakat Sunda saat itu tidak saja sebagai pemimpin untuk wilayah kabupaten, tetapi juga sosok yang menjadi panutan rakyat. Seorang bupati memiliki hak-hak istimewa, antara lain menangkap ikan di sungai atau berburu rusa di hutan-hutan tertentu. Hak-hak istimewa tersebut sangat dihormati oleh warganya, sehingga masyarakat tidak berani untuk menangkap ikan atau berburu dan merambah hutan sembarangan tanpa ada izin dari bupati. Tidak hanya itu, masyarakat pun menjaga dan memelihara sungai dari pengruskan dan pencemaran, begitu pula dengan hutan-hutannya. Upaya pemeliharaan lingkungan yang dilakukan masyarakat dipandang sebagai suatu kewajiban rakyat demi kepentingan penguasa pribumi. Kewajiban itu mereka lakukan

tanpa memperdulikan apakah bupati menyuruh mereka atau pun tidak.

3. Krisis Citarum dalam Pengabaian Nilai-nilai Kasundaan

Pemanfaatan aliran Citarum semakin meluas seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan itu. Citarum tidak lagi sebatas penyedia air untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian, tetapi juga menjadi sarana penerang setelah ia difungsikan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Sejak 1917 hingga 1988 sejumlah PLTA telah dibangun di sepanjang aliran sungai Citarum mulai dari PLTA Plengan, Lamajang, Cikalong, Jatiluhur, Saguling, hingga Cirata. Manfaat Citarum ini tidak saja dirasakan penduduk di Jawa Barat, tetapi juga puluhan juta penduduk Indonesia yang berada di pulau Jawa dan Bali. Hanya saja seiring pembangunan pembangkit-pembangkit listrik tersebut terdapat kesan bahwa kepedulian masyarakat dalam memelihara dan menjaga kelestarian Citarum semakin menurun (Hardjasaputra, 2009).

Menurunnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian Citarum sebagian besar dipicu oleh adanya perubahan pola hidup, dari masyarakat petani menjadi masyarakat industri. Sebagaimana dimaklumi, sejak masa Orde Baru hingga era Reformasi saat ini, industrialisasi terus dibangun oleh pemerintah. Di berbagai daerah di bangun pabrik-pabrik, tidak terkecuali di wilayah-wilayah sekitar daerah aliran Citarum, mulai dari hulunya di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung, hingga Karawang dan Bekasi di

hilirnya. Akumulasi kerusakan ekosistem Citarum yang semakin meluas dari tahun ke tahun menjadikan beragam upaya yang dilakukan untuk menanganinya seolah tidak kunjung tuntas. Bahkan, menurut Rusmana (2018), rusaknya ekosistem Citarum terkesan kurang mendapat perhatian, baik oleh masyarakat maupun oleh pihak pemerintah sendiri.

Derita yang menimpa Citarum sedemikian rumit. Sejak di hulunya, hutan lindung yang menjadi daerah resapan air, dari tahun ke tahun semakin berkurang. Tidak ada lagi "*leuweung larangan*", tidak ada lagi pantangan. Terjadi alih fungsi lahan (deforestasi) hutan lindung di daerah aliran sungai menjadi kebun sayuran, pemukiman dan kawasan industri. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, Dadan Ramdan menuturkan, bahwa kawasan yang luasnya mencapai 44 hektare itu seharusnya menjadi kawasan hijau, tempat resapan air. Saat ini 60% ekosistemnya rusak parah, sehingga mengancam ketersediaan air secara kualitas maupun kuantitas. Tanah menjadi rawan dan longsor tidak lagi terhindarkan. Longsoran tanah dan lumpur jatuh memenuhi aliran sungai yang mengakibatkan terjadinya pendangkalan. Sehingga, banjir kerap kali terjadi setiap musim hujan. Dampaknya tidak sekedar merendam lahan pertanian, tetapi juga pabrik-pabrik dan pemukiman penduduk di daerah aliran sungai dan sekitarnya.

Menurut Hardjasaputra (2009), banjir Citarum memang sudah terjadi sejak dulu, tetapi dampak kerusakan yang diakibatkannya tidak separah zaman sekarang karena ekosistem Citarum dulu tetap terpelihara. Diberitakan bahwa ketika banjir

melanda, masyarakat mengalami gatal-gatal, diare dan malaria. Banjir ini pula yang menjadi salah satu alasan dipindahkannya ibukota Kabupaten Bandung dari Krapyak ke tengah kota sebagaimana tempatnya saat ini. Peristiwa itu terjadi pada 25 September 1810 ketika Bupati R.A. Wiranatakusumah II berkuasa, dan akhirnya diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung.

Pembangunan kawasan industri di Majalaya pada masa Orde Baru menjadi awal petaka bagi Citarum. Kini ada sekitar 2000-an pabrik berdiri di sepanjang aliran sungai itu, dan setiap harinya tidak kurang dari 280 ton limbah cair dibuang ke sungai akibat buruknya manajemen pengelolaan limbah. Deni Riswandani (DW Indonesia/RZN/HP, 2018), salah seorang aktivis lingkungan, menuturkan bahwa pabrik-pabrik besar yang memiliki sistem pengolahan limbah tidak menggunakannya secara maksimal. Sebagian besar hanya memfungsikannya secara formalitas saja. Ahli Lingkungan dari Universitas Padjadjaran, Erri Megantara (dalam Wawa, 2011), mengatakan bahwa peran Citarum semakin berkurang, bahkan bisa dikatakan tidak ada lagi akibat pencemaran ini. Logam berat yang terkandung dalam air Citarum tidak lagi baik untuk pengairan pertanian, apalagi perikanan, lebih-lebih sebagai bahan baku air minum warga. Akibatnya, para petani padi kerap kali mengalami gagal panen, dan banyak petani tambak pun gulung tikar karena berbagai jenis ikan dan udang mati ketika air Citarum digunakan.

Kesadaran masyarakat Sunda tentang *kabuyutan*-nya semakin rendah. Mereka sudah terperangkap dalam budaya kemodernan kota yang



individualis, konsumtif, dan serba praktis (Rusmana, 2018), dan tidak tanggap pada Citarum yang kian menderita dan merana.

KESIMPULAN

Menyadari pentingnya kelestarian sungai Citarum bagi kelangsungan hidup masyarakat, pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah sudah melakukan upaya-upaya untuk menangani kerusakan yang terjadi. Beragam peraturan sudah diterbitkan, dan sejumlah anggaran pun dikeluarkan. Namun, keberhasilan program-program tersebut belum nampak dalam mengembalikan Citarum pada kondisi yang baik. Melalui Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, yang dikenal dengan Program Citarum Harum, pemerintah kembali melakukan upaya-upaya perbaikan tersebut. Melalui program ini, pemerintah menargetkan 7 tahun untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah kerusakan ekosistem Citarum yang terjadi hingga saat ini.

Namun, upaya pembenahan tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah tanpa adanya peran serta masyarakat. Oleh karenanya, upaya-upaya membangun kembali kesadaran masyarakat tentang perlunya menjaga lingkungan hidup perlu ditumbuhkan. Diungkapnya kembali *kabuyutan* dan filsafat *tritangtu* sebagai warisan leluhur Sunda diharapkan mampu mengembalikan budaya kolektif dan guyub masyarakat Sunda, yang selama ini hanya tersisa dalam bentuk pentas seni budaya wawacan (*beluk*) di sebagian kecil masyarakat Bandung Selatan (Rusmana, 2018).

Penggalian dan pemberdayaan *kabuyutan* sebagai sumber nilai etika, logika, dan estetika (Sumardjo, 2009) diorientasikan pada program perolehan fungsi dan manfaatnya secara berkelanjutan, yang antara lain diarahkan pada upaya untuk melindungi dan memulihkan kembali kabuyutan yang telah rusak, pengembangan ekonomi rakyat dan perlindungan lingkungan, serta sosialisasi informasi nilai-nilai warisan leluhur tersebut melalui bidang-bidang seni, pendidikan, serta pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan secara terpadu (Abdurahman & Yustiaji, 2003).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, O., & Yustiaji. (2003). *Kabuyutan untuk Pengelolaan Lingkungan*. sundanet.com. <http://sundanet.com/article/content/216>
- Aritonang, J. S. (2018). *Teologi-Teologi Kontemporer*. BPK Gunung Mulia.
- Atja, & Danasasmita, S. (1981). *Amanat Dari Galunggung (Kropak 632 dari Kabuyutan Ciburuy, Bayongbong - Garut)*. Proyek Pengembangan Permusieuman Jawa Barat.
- Budiman, R. P. (2015). "Air, Manusia, dan Pandangan Budaya." www.kompasiana.com. <https://www.kompasiana.com/ryakair/5516df8aa333111370ba8d89/air-manusia-dan-pandangan-budaya>
- Djasepudin, D. (2019). *Sunda dan Kemuliaan Air*. www.kompasiana.com. <https://www.kompasiana.com/djadjas/5d3a6e60097f364f274d81b2/sunda-dan-kemuliaan-air?page=all>
- DW Indonesia/RZN/HP. (2018). *Bagaimana Industri Tekstil*

- Membunuh Sungai Citarum*.
dw.com.
<https://www.dw.com/id/bagaiman-a-industri-tekstil-membunuh-sungai-citarum/a-42795632>
- Gemini, G. E. (2017). *Air dalam Budaya Nusantara*. <http://galunradjasunu.blogspot.com>.
<http://galunradjasunu.blogspot.com/2017/08/air-dalam-budaya-nusantara.html>
- Hardjasaputra, A. S. (2009). *Citarum Dalam Perspektif Sejarah*.
www.kaigara.com.
<https://www.kairaga.com/2009/10/14/citarum-dalam-perspektif-sejarah/>
- Johari, A. (2016). Representasi Mitos dan Makna Pada Visual Lambang Daerah. *RITME*, 2 No. 1, 33–50.
<https://ejournal.upi.edu/index.php/ritme/article/view/5080/3541>
- Kementerian Lingkungan Hidup, M. L. H. P. M. (2011). *Teologi Lingkungan (Etika Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Islam)* (II). Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup Dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Kusmayadi, D. (2015). *Pengertian Kabuyutan*.
<http://cipakudarmaraja.blogspot.com>.
<http://cipakudarmaraja.blogspot.com/2015/11/pengertian-kabuyutan.html?m=0>
- Merdeka.com/Did. (2018). *5 Sungai tercemar di dunia, salah satunya di Indonesia*. Merdeka.com.
<https://www.merdeka.com/peristiwa/5-sungai-tercemar-di-dunia-salah-satunya-di-indonesia.html?page=all>
- Napitupulu, N. D., Achmad Munandar, Redjeki, S., & Tjasyono, B. (2018). Ecotheology dan Ecopedagogy: Upaya Mitigasi terhadap Eksploitasi Alam Semesta. *Voice of Wesley Jurnal Ilmiah Musik dan Agama*, 1, No. 2.
<https://jurnalvow.sttwmi.ac.id/index.php/jvow/article/view/9/9>
- Nasr, S. H. (1990). *Man and Nature The Spiritual Crisis of Modern Man*. Unwin Paperbacks.
- Republika.co.id. (2019). *82 Persen Sungai di Indonesia Tercemar dan Kritis*. Republika.co.id.
<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/porsc1383/82-persen-sungai-di-indonesia-tercemar-dan-kritis>
- Rusmana, T. (2018). Rekonstruksi Nilai-Nilai Konsep Tritangtu Sunda Sebagai Metode Penciptaan Teater Ke Dalam Bentuk Teater Kontemporer. *MUDRA Jurnal Seni Budaya*, 33 No. 1((2018): Februari), 114–127.
- Sumardjo, J. (2009). Kosmologi dan Pola Tiga Sunda. *Imaji*, 101–110.
- Suryalaga, H. (2009). *Amanat Galunggung Prabuguru Darmasiksa Leluhur Sunda*.
<https://artshangkala.wordpress.com>.
<https://artshangkala.wordpress.com/2009/09/23/amanat-galunggung-prabuguru-darmasiksa-leluhur-sunda/>
- Wartawan dan Kolumnis Kompas. (2011). *Ekspedisi Citarum Sejuta Pesona dan Persoalan Laporan Jurnalistik Kompas* (J. A. Wawa (ed.)). Kompas.